

Analisis Penerapan *Smart Governance* di Kabupaten Polewali Mandar

Author:

Muh. Hidayat Basri¹, Agung Nurrahman^{2*}

Affiliation:

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, Jl. Pameran Lingkungan Batu-Batu Kelurahan Darma, Indonesia¹

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km, 20, Jatinangor, Indonesia²

e-Mail: dayatji1234@gmail.com¹, agung_nurrahman@ipdn.ac.id²

*Correspondence Author



Received, 03 Desember 2025

Revised, 29 Desember 2025

Accepted, 30 Desember 2025

Available Online, 31 Desember 2025

Abstrak

Adanya penurunan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dari tahun 2020 ke 2021, yang diperoleh Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam kapasitas tata kelola digital, dan kesiapan infrastruktur dalam penerapan *smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *Smart governance*, seperti masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Polewali Mandar, dan beberapa Perusahaan. Adapun antusias masyarakat masih tergolong rendah atau kurang karena akses ke platform government masih sedikit namun telah menunjukkan progres yang positif secara menyeluruh diantaranya dengan adanya beberapa kali pemerintah melaksanakan sosialisasi terkait digitalisasi dan pemanfaatan TIK dan Rapat Musrenbang yang melibatkan masyarakat dan stakeholder pemerintah. Pemerintah telah menyediakan layanan online melalui website atau aplikasi pemerintah yang dapat diakses semua kalangan; masih diperlukan infrastruktur tambahan seperti ruang atau bangunan command center, untuk memaksimalkan fungsi koordinasi, pemantauan, dan proses pengambilan keputusan strategis; pemerintah telah menyediakan website atau aplikasi, instagram dan youtube untuk memberikan berbagai informasi kepada masyarakat. Dan memiliki sarana prasarana fisik pendukung lainnya untuk menyebarkan informasi seperti kendaraan, videotron, dan baligho; hasil akuntabilitas tercermin pada sasaran strategis Polewali Mandar tahun 2023 dimana menunjukkan bahwa telah tercapai dengan baik; belum adanya kebijakan khusus dalam penerapan smart city di Kabupaten Polewali Mandar. Kesimpulannya, penerapan *smart governance* terselenggara dengan cukup baik, dan memiliki potensi peningkatan dalam penerapannya.

Kata Kunci: Partisipasi Pengambilan Keputusan, Pelayanan Publik dan Sosial, Transparansi Pemerintah, Strategi dan Perspektif Politik.

Abstract

The decline in the electronic-based governance index from 2020 to 2021, obtained by Polewali Mandar Regency, indicates that there are fundamental problems in digital governance capacity and infrastructure readiness in the implementation of smart governance in Polewali Mandar Regency. The purpose of this study is to analyze the implementation of smart governance in Polewali Mandar Regency. The research method used is quasi-qualitative. The results of the study show that there are parties involved in the implementation of Smart governance, such as the community, OPDs in Polewali Mandar, and several companies; community enthusiasm is still relatively low or lacking because access to government platforms is still limited; however positive progress has been shown as the government has held several socialization events related to digitalization and the use of ICT as well as Musrembang meetings involving the community and government stakeholders. The government has provided online services through government websites or applications that can be accessed by all groups; additional infrastructure is still needed, such as command center rooms or buildings, to maximize the functions of coordination, monitoring, and strategic decision-making processes; The government has provided websites, applications, Instagram, and YouTube to provide various information to the public. It also has other physical infrastructure to disseminate information, such as vehicles, videotrons, and billboards. The accountability results are reflected in the 2023 strategic objectives of Polewali Mandar, which show that they have been achieved well. There are no specific policies on the implementation of smart cities in Polewali Mandar Regency. In conclusion, the implementation of smart governance has been carried out quite well and has the potential for improvement in its application.

Keywords: *Decision Making Participation, Public and Social Services, Governance Transparency, Political Strategy and Perspective.*

1. Pendahuluan

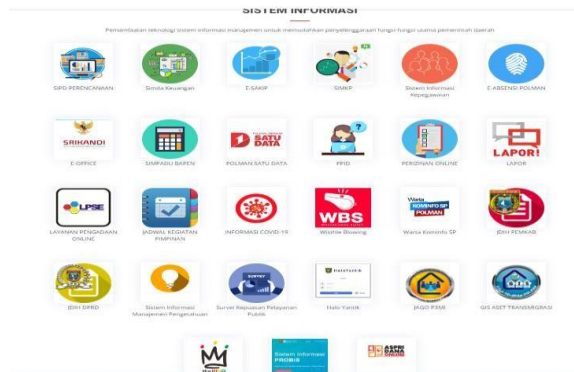
Salah satu aspek penting dalam mendukung implementasi *Smart governance* adalah kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena SPBE merefleksikan tingkat kematangan tata kelola digital pemerintah daerah. Namun indeks SPBE pemerintah kabupaten Polewali Mandar khususnya pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yakni 3,30 turun ke 2,71. Indeks SPBE Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Indeks SPBE tahun 2018-2021 Kabupaten Polewali Mandar

Tahun	Indeks	Predikat
2018	2,51	Cukup
2019	2,57	Cukup
2020	3,30	Baik
2021	2,71	Baik

Sumber: Hasil Evaluasi Indeks SPBE oleh Kemenpan RB dari tahun 2018-2021, selanjutnya diolah peneliti.

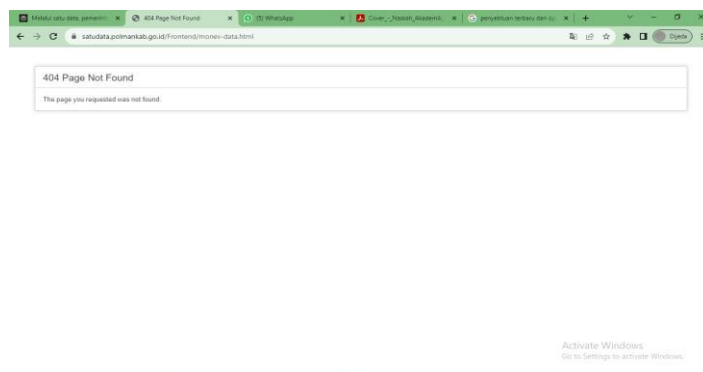
Berdasarkan tabel tersebut, indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan dari tahun 2020-2021. Adapun spek-aspek yang dinilai adalah aspek domain kebijakan SPBE dengan nilai 3,0, aspek domain tata Kelola dengan nilai 1,90, dan aspek domain manajemen dengan nilai 1,55, serta aspek domain layanan dengan nilai 3,49.9 Penurunan tersebut menjadi sebuah fenomena yang tak biasa dan menjadi catatan bagi pemerintah kabupaten terkait penerapan *Smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar.



Sumber: <https://polmankab.go.id>

Gambar 1. Tampilan Website Aplikasi Pelayanan Publik Kabupaten Polewali Mandar

Di sisi lain, merujuk pada gambar di atas yaitu terdapat beberapa website yang dikelola oleh dinas/badan daerah yang dimana dapat di akses melalui <https://polmankab.go.id/> sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan dan informasi publik di kabupaten Polewali Mandar. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, sebagaimana tertera pada gambar berikut.



Sumber: <https://satudata.polmankab.go.id>

Gambar 2. Tampilan Error pada Aplikasi Polman

Merujuk gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa pada aplikasi website Polman Satudata yang ada pada website resmi Kabupaten Polewali Mandar masih ditemukannya hambatan dalam mengakses pelayanan dan informasi pada aplikasi, yang dapat menjadi penghambat dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar.



sumber: polewalimandar.sipd.go.id

Gambar 3. Tampilan Error pada SIPD Perencanaan

Selain website Polman Satudata, juga terdapat kendala pada aplikasi maupun sistem informasi lainnya seperti gambar 3. Terlihat bahwa masih mengalami kendala dalam mengakses website SIPD Perencanaan yang mana aplikasi ini merupakan salah satu website pendukung dalam penerapan *smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang *smart governance* cukup banyak telah dikaji. Penelitian Triyanto et al. (2024) menunjukkan bahwa *smart governance* dapat diukur melalui peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik, keikutsetaan masyarakat dalam pengambilan Keputusan, dan adanya transparansi. Di sisi lain, Nursetiawan & Putra (2021) menjelaskan bahwa dukungan regulasi dibutuhkan dalam penerapan *smart governance*. Senada dengan hal tersebut Rahmatullah (2021) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat mendukung *smart governance* yaitu adanya kebijakan, keterbukaan informasi, dan dukungan teknologi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Damayanthi & Nugroho (2023) bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi ukuran keberlanjutan penerapan *smart governance*. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Sarofah (2022) bahwa

penerapan *smart governance* dapat diperkuat dengan konsep kolaborasi penta helix.

Kajian terdahulu belum secara khusus mengintegrasikan teori Giffinger dengan evaluasi empiris SPBE, terutama pada daerah yang mengalami penurunan signifikan seperti Kabupaten Polewali Mandar yang indeks SPBE-nya turun dari 3,30 menjadi 2,71 pada 2020–2021. Selain itu, masih terbatas penelitian yang memadukan analisis domain SPBE, dengan indikator *smart governance*. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori Giffinger dengan evaluasi empiris terhadap dinamika SPBE di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini dipilih karena penulis terlibat langsung di lapangan untuk memahami fenomena secara empiris (Mappasere & Suyuti, 2019). Penelitian ini mempedomani konsep *smart governance* yang disampaikan oleh Giffinger, bahwa terdapat empat aspek *smart governance* yaitu partisipasi dalam pengambilan Keputusan, pelayanan publik dan sosial, transparansi pemerintah, dan strategi dan perspektif politik (Giffinger et al., 2007). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dilakukan wawancara kepada Kepala Bappedalitbang, Kepala Diskominfo, Sekretaris Diskominfo, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Diskominfo, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Pranata Komputer, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Disdukcapil, dan masyarakat. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

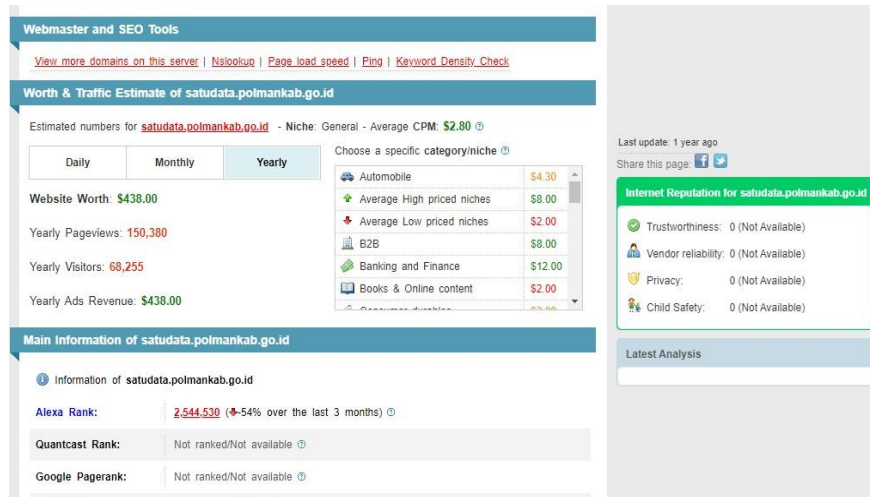
Penerapan *Smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar

Untuk mengkaji lebih dalam terkait *Smart governance* di kabupaten Polewali Mandar, penulis mengkajinya dengan menggunakan teori dari Giffinger yang memiliki empat dimensi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, layanan publik dan sosial, transparansi, serta strategi dan perspektif politik (Giffinger et al., 2007).

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kominfo-SP pada tanggal 9 januari 2024 di Dinas Kominfo-SP di ruangan sekretaris dinas mengenai partisipan atau pelaksana *Smart governance* mengatakan bahwa selain peran pemerintah dan masyarakat, kelompok pemuda serta relawan TIK yang dibentuk melalui kolaborasi Dinas Kominfo-SP dan FCDO Inggris dalam kerangka Digital Access Programme tahun 2022 berkontribusi pada peningkatan literasi digital masyarakat melalui pengembangan Sekolah Internet Komunitas. Hasil dari wawancara di atas bahwa pada indikator partisipan menunjukkan hasil yang baik dimana partisipan atau pelaksana *smart governance* di Polewali Mandar tidak hanya dilaksanakan antar pemerintah dalam hal ini perangkat daerah dan masyarakat umum tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok atau tim relawan TIK yang terbentuk atas kemauan dari organisasi-organisasi pemuda maupun relawan TIK yang dibentuk Kominfo atas perintah dari pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

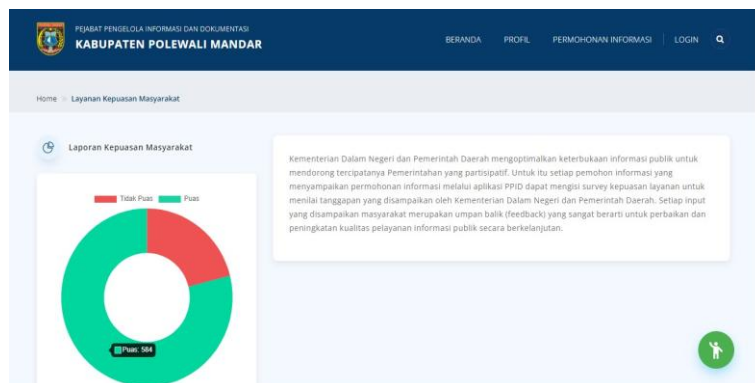
Adapun hasil wawancara penulis dengan Pranata komputer pada bidang Teknologi Informasi dan Persandian (TIP) pada tanggal 9 januari 2024 di ruangan bidang TIP mengenai tingkat partisipasi pelaksanaan *smart governance* dalam mendukung tata kelola digital yang cerdas: “Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah penggunaan platform digital seperti aplikasi pemerintah, layanan aduan masyarakat, ataupun sistem informasi yang telah disediakan oleh pemerintah”.



Sumber: Statshow.com, akses pada 9 Januari 2024.

Gambar 4. Jumlah Pengunjung Website Polman SatuData per Tahun

Penulis melakukan *traffic website* pada website Polman satuDATA di statshow.com untuk melihat seberapa banyak pengunjung aplikasi web Polman SatuData. Berdasarkan gambar 4. di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung per tahun pada aplikasi website Polman SatuDATA adalah sebanyak 68.295 pengunjung dengan rata-rata website dibuka sebanyak 150.380 kali dalam satu tahun.



Sumber: ppid.polmankab.go.id, akses pada 9 Januari 2024

Gambar 5. Layanan Kepuasan Masyarakat pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Polewali Mandar

Selain website Polman SatuData, juga terdapat sistem informasi PPID dengan layanan kepuasan masyarakat dimana indeks Puas sebesar 78,9% yaitu sebanyak

584 orang dan TIDAK PUAS sebesar 21,1% atau sebanyak 156 orang. Kepala bidang Teknologi Informasi dan Persandian dinas Kominfo-SP juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar melalui SP4N-LAPOR! pada tahun 2023 masih rendah, tercermin dari hanya empat laporan yang masuk, yang menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi layanan aduan berkontribusi pada rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih belum tercapai dengan baik, hal ini terbukti di beberapa platform digital masyarakat yang berpartisipasi terlihat jauh lebih sedikit dari populasi masyarakat Polewali Mandar. Akan tetapi, dari sekian banyaknya yang berpartisipasi pada platform *smart governance* seperti PPID, masyarakat Puas atas layanan yang diberikan.

Menurut sekretaris dinas kominfo-SP mengenai frekuensi partisipasi atau seberapa sering melibatkan partisipan dalam proses pengambilan keputusan di ruangan sekretaris dinas pada tanggal 11 januari 2024 mengungkapkan bahwa pemerintah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan melalui rapat dan kegiatan sosialisasi pendampingan yang dilaksanakan sekitar tiga hingga empat kali per tahun, dengan frekuensi yang disesuaikan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Adm. Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana merupakan salah perangkat daerah yang juga sering terlibat dalam sosialisasi maupun pendampingan tentang SPBE ataupun pemanfaatan teknologi dan informasi, beliau mengungkapkan bahwa: "Untuk seberapa seringnya kami terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan apapun itu yang menyangkut wewenang pemerintah daerah baik itu SPBE, pemanfaatan TIK, atau dalam hal Pembangunan dalam setahun, adalah ya. Satu tahun 2 sampai 3 kali. Tahun lalu ada sosialisasi pemanfaatan website perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik".



Sumber: LAKIP Diskominfo-SP Polewali Mandar Tahun 2023 (Diakses 19 April 2024)

Gambar 6. Sosialisasi Pemanfaatan Website Pemerintah Daerah

Adapun hasil wawancara penulis bersama Kepala Bappeda-Litbang Polewali Mandar terkait seberapa seringnya melibatkan masyarakat dan stakeholder pemerintah dalam proses pengambilan keputusan ialah beliau mengungkapkan bahwa: “Mungkin maksud adek, semisal ada rapat-rapat gitu ya? Contohnya ada dalam penyusunan RKPD itu kami selalu melibatkan tokoh masyarakat dan stakeholder pemerintah. Misalnya, kegiatan Musrenbang Kecamatan, kami lakukan rutin di setiap tahun di 16 kecamatan di Polewali Mandar”.



Sumber: <https://balitbangren.polmankab.go.id/>, diakses pada 13 Januari 2024

Gambar 7. Musrenbang Kecamatan dalam Rangka Penyusunan RKPD Polewali Mandar Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, menunjukkan bahwa hasil pada indikator frekuensi partisipasi menunjukkan hasil yang baik dan tercapai yang dimana partisipasi baik dari masyarakat dan stakeholder pemerintah

telah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan seperti pada kegiatan sosialisasi dan rapat musrenbang. Hasil penelitian ini senada dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengedepankan sosialisasi secara digital dilakukan dalam penerapan *smart governance* (Gafar & Nurrahman, 2024; Todapa & Saputra, 2025).

2) Pelayanan Publik dan Sosial

Wawancara yang dilakukan dengan Pranata komputer bidang Teknologi Informasi dan Persandian dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 9 Januari 2024 di ruangan bidang Teknologi Informasi dan Persandian menyatakan bahwa berbagai aplikasi dan sistem informasi di Kabupaten Polewali Mandar telah dikelola oleh Diskominfo untuk mendukung layanan publik dan pemerintahan, namun optimalisasinya masih menghadapi keterbatasan akses SIPD Perencanaan serta kebutuhan penguatan integrasi data makro dan mikro melalui Polman SatuDATA.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo pun mengatakan bahwa: “layanan yang menjadi perhatian saat ini adalah LAPOR dikarenakan dari sekian banyaknya masyarakat di kabupaten, hanya empat orang yang terdaya melakukan aduan dan aspirasi di sepanjang tahun 2023”. Kemudian penulis menggali informasi bersama Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Adm. Kependudukan Disdukcapil Polewali Mandar terkait ketersediaan layanan yang disediakan, beliau mengatakan: “Untuk layanan yang ada di disdukcapil sendiri, kami menyediakan ada tiga jenis bentuk layanan, pertama layanan langsung di kantor, lalu ada layanan online melalui aplikasi whatsapp, lalu ada layanan jemput bola dimana pihak dinas datang ke lokasi yang cukup sulit dijangkau.



Sumber: dinasdukcapil.polmankab.go.id, diakses 14 mei 2024

Gambar 8. Layanan Jemput Bola (JEBOL) oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil wawancara dan data dukung yang diperoleh penulis, maka diketahui bahwa telah terdapat beberapa layanan aplikasi berbasis website atau sistem informasi yang Tengah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, dari segi pelayanan public, Disdukcapil memiliki layanan seperti layanan JEBOL (Jemput Bola) dan layanan online yang telah diterapkan. Maka, hasil pada indicator ketersediaan layanan ini adalah telah tercapai dengan baik.

Hasil wawancara dengan kepala bidang Teknologi Informasi dan Persandian Kominfo-SP pada tanggal 10 januari 2024 di ruangan bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Kominfo-SP Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa: “Untuk saat ini dinas Kominfo-SP Polewali Mandar dari segi infrastruktur sendiri cukup memadai dari apa yang menjadi urgensi saat ini menjadi hal yang diutamakan untuk dilaksanakan, namun untuk meningkatkan kualitas mungkin perlunya bangunan command centre seperti kota-kota Smart city lainnya sehingga kita bisa perlahan menuju Polman Smart city”.

Penulis juga memperoleh informasi terkait infrastruktur di Dinas Kominfo-SP oleh Sekretaris Dinas Kominfo-SP Polewali Mandar yang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan berbasis TIK, namun ketiadaan command centre disebabkan oleh belum diprioritaskannya pembangunan tersebut dalam RPJMD

2019–2024 dan RENSTRA Dinas Kominfo-SP karena fokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan akses TIK lainnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa infrastruktur layanan publik dan sosial di Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya telah memadai, namun belum optimal dalam mendukung *Smart governance* karena ketiadaan command centre sebagai pusat koordinasi dan pemantauan terpadu. Hal tersebut bertentangan dengan temuan penelitian Anjani et al. (2024) bahwa adanya command centre menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan smart city, karena melalui command centre maka dapat mendukung adanya pemantauan wilayah dalam waktu 24 jam. Di sisi lain, command centre pun dapat mendukung adanya pemantauan kondisi jalan agar terhindar dari kemacetan, dan didukung oleh CCTV (Aisyah, 2021). Pembangunan command center pada dasarnya berfungsi sebagai layanan publik dan pusat informasi, yang kini dikembangkan oleh berbagai daerah sebagai bagian dari inovasi smart city (Salamate, 2022). Command Centre berperan dalam meningkatkan mutu layanan publik sekaligus mendukung efisiensi proses manajerial dan pengambilan keputusan internal dalam mendukung Smart City (Theresia, 2022). Di sisi lain, disebutkan pula bahwa Infrastruktur digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kelincahan tata kelola, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan, partisipasi warga, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas publik dalam kerangka *Smart governance* (Timur & Supriya, 2026). Oleh karena itu dibutuhkan adanya penyusunan kebutuhan infrastruktur dalam penerapan smart city (Santoso & Rahmadanita, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa adanya command centre menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam rangka penguatan infrastruktur dalam penerapan *smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar.

3) Transparansi Pemerintah

Penulis melakukan wawancara kepada dua orang informan dimana terdiri dari kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan masyarakat mahasiswa Universitas Al-Syariah Mandar yang sedang melaksanakan magang di Kantor Dinas

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Informasi dan dan Komunikasi publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 januari 2024 mengenai penyampaian informasi di kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan informasi publik melalui berbagai platform digital dan didukung oleh mobil layanan komunikasi keliling, sehingga diseminasi informasi kepada masyarakat dinilai telah berjalan secara efektif.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas Al Syariah Mandar yang sedang magang di kantor bupati yang berumah tinggal jauh dari kota lebih tepatnya di kecamatan luyo mengenai penyampaian atau penyediaan informasi di kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dinilai cukup terbuka dalam penyediaan informasi publik melalui kombinasi media digital dan konvensional, termasuk layanan daring, mobil informasi keliling, baliho, dan videotron, sehingga memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

Hasil dari wawancara mengenai keterbukaan informasi di Kabupaten Polewali Mandar dengan informan menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik yaitu dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada serta infrastruktur IT yang sudah digunakan sebagaimana mestinya terbukti dengan adanya layanan sistem informasi dan media-media penyeberan informasi lainnya seperti baliho dan videotron di Kabupaten Polewali Mandar.

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Polewali Mandar di ruangan Sekretaris Dinas pada tanggal 11 januari 2024 mengenai transparansi pemerintah kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal resmi yang dikelola Dinas Kominfo-SP, meskipun penyampaian informasi dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut. hasil wawancara dengan Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik mengenai

akses masyarakat terkait transparansi di Kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa: "Segala bentuk informasi di kabupaten telah tersedia dalam bentuk fisik yang disebar melalui Videotron, baligho, dan lain-lain. Adapun penyampaian informasi melalui media sosial seperti Instagram, youtube, dan facebook dan sistem informasi seperti aplikasi atau website menyediakan berbagai informasi juga ya".

Tabel 2. Capaian Kinerja Dinas Kominfo-SP dalam mewujudkan Predikat Informatif

No.	Variabel	Persentase	Nilai	Hasil
1	Pengumuman lewat website	25 %	96,15	24,04
2	Pelayanan Informasi	30 %	90,15	27,05
	Informasi wajib berkala		89,58	
	Informasi tersedia setiap saat		85,4	
	Datar Informasi Publik		95,45	
3	Pendokumentasian	25 %	92,5	23,125
4	Pelayanan Informasi	20 %	94,45	19,09
Total		100 %	-	90,30
Predikat Menuju Informatif				

Sumber: LAKIP dinas Kominfo-SP kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan wadah penyampaian informasi seputar kabupaten dari berbagai aspek secara transparansi yaitu melalui media sosial dan media lainnya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar memiliki bidang yang mengelola informasi dan menyampaikannya ke publik. Informasi tersebut disampaikan baik melalui media sosial instagram, facebook, dan youtube serta website pemerintah kabupaten. Maka indikator transparansi pada dimensi transparansi pemerintah menunjukkan telah tercapai dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *smart governance* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal tersebut berkesesuaian dengan pendapat Rahmadanita et al., (2019) bahwa dampak positif penerapan *smart governance* adalah dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 januari 2024 di ruangan Sekretaris Diskominfo-SP kabupaten Polewali Mandar mengenai akuntabilitas dalam pelaksanaan e-government di lingkup pemerintah kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa sebagai leading sektor pelaksanaan e-government, Dinas Kominfo-SP Kabupaten Polewali Mandar menetapkan target kinerja yang terukur dan melaksanakan layanan, informasi, serta pembangunan daerah berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku untuk mendukung terwujudnya *Smart governance*.

Penulis juga menggali informasi melalui wawancara dengan kepala bidang Teknologi Informasi dan Persandian di ruang tamu dinas Kominfo-SP kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Januari 2024 mengenai akuntabilitas atau kinerja dinas Kominfo-SP sebagai induk pengelolaan egovernment dalam mewujudkan *Smart governance* mengatakan bahwa akuntabilitas Dinas Kominfo-SP dalam penyelenggaraan e-government tercermin dalam LAKIP sebagai instrumen pengukuran kinerja tahunan, dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 106,19 persen dari target yang ditetapkan.

Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Kominfo-SP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (92,40)	Menuju Informatif (93,30)	100,97
Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik			
Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Terstandarisasi Kolaborasi	132,16
Indikator : Persentase Fungsifungsi Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	80	80	100

Indikator : Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data Dan Dapat Diakses Secara Online			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	A	A	104,01
Perangkat Daerah	(86,00)	(89,45)	
Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah			
Indikator : Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan Dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100
Indikator : Indeks Pengguna Layanan Perangkat Daerah	Sangat Baik (98,80)	Sangat Baik (98,82)	Sangat Baik 100,02
			106,19%

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis tersebut diatas, penulis menemukan bahwa akuntabilitas dinas Kominfo-SP kabupaten Polewali Mandar memiliki regulasi dan standard atau target kinerja yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari hasil capaian kinerja dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 seperti tabel di atas. Sehingga hasil pada indikator akuntabilitas Transparansi Pemerintah telah terlaksana dengan baik dan tercapai secara maksimal.

4) Strategi dan Perspektif Politik

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bappeda-Litbang kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 14 Januari 2024 di ruangan Kepala Bidang mengenai strategi atau visi pemerintah kabupaten Polewali Mandar terkait *Smart governance* mengatakan bahwa dalam menghadapi transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memfokuskan pembangunan pada penguatan *Smart governance* melalui inovasi tata kelola berbasis TIK, sejalan dengan misi daerah untuk

mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, partisipatif, serta didukung oleh infrastruktur, layanan e-government, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kominfo-SP kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 10 Januari 2024 di ruangan sekretaris dinas Kominfo-SP mengenai strategi pemerintah terhadap *Smart governance* mengatakan bahwa implementasi *Smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar melalui SPBE sempat mengalami penurunan kinerja pada periode 2020–2021 akibat belum tersedianya kebijakan daerah, keterbatasan SDM, serta belum terintegrasinya pengembangan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun, sejak diberlakukannya kebijakan SPBE, penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta dukungan keamanan dari BSSN, indeks SPBE meningkat signifikan hingga mencapai predikat sangat baik pada tahun 2023.



Sumber: [//sulbar.tribunnews.com/2022/06/07/transformasi-polman-jadi-smart-city-pemkab-gandeng-bni-wilayah-7-ditandai-dengan-teken-mou](https://sulbar.tribunnews.com/2022/06/07/transformasi-polman-jadi-smart-city-pemkab-gandeng-bni-wilayah-7-ditandai-dengan-teken-mou)

Gambar 9. Dokumentasi Pencanaan Program Smart City Tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa rencana penancangan program smart city di Kabupaten Polewali Mandar telah ada sejak tahun 2022 dimana pihak BNI Wilayah 07 Makassar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka pemanfaatan fasilitas layanan jasa perbankan sekaligus mendukung program smart city di Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pranata Komputer bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada tanggal 11 Januari 2024 di ruangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mengenai dasar kebijakan penerapan *Smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa landasan kebijakan *Smart governance* pada prinsipnya merujuk pada kebijakan Smart City, namun hingga saat ini Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemerintah daerah tengah menjalin kerja sama dengan BNI sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi Smart City, sehingga fondasi awal penerapan *Smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar bertumpu pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun hasil wawancara penulis dengan kepala Bappeda-Litbang Polewali Mandar pada tanggal 13 Januari 2024 di ruangan kepala badan mengenai dasar kebijakan *Smart governance* di kabupaten Polewali Mandar beliau mengatakan bahwa meskipun regulasi Smart City belum ditetapkan di Kabupaten Polewali Mandar, implementasi *Smart governance* tetap dijalankan melalui penerapan SPBE dengan berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai indikator kebijakan *Smart governance* diketahui bahwa *Smart governance* merupakan komponen utama dalam penerapan Smart city namun pencaanangan Smart city di Polewali Mandar masih sebatas wacana. Dasar kebijakan *Smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar adalah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan selanjutnya diturunkan menjadi Perbup Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara itu, disebutkan bahwa penyusunan kebijakan daerah yang mendukung penerapan *smart governance* merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan (Mauludi & Nurrahman, 2024).

4. Kesimpulan

Pemerintah kabupaten Polewali Mandar tengah berupaya untuk menciptakan tata kelola cerdas atau *Smart governance*. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar telah menerapkan dengan baik namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal merujuk pada dimensi dari teori yang digunakan. Terdapat pada beberapa dimensi menunjukkan hasil bahwa yang pertama partisipasi masyarakat, dimana partisipasi masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah. Dalam dimensi layanan publik dan sosial, Pemerintah kabupaten Polewali Mandar sudah menerapkan sistem layanan online dan layanan *face to face* yang bersifat jemput bola yang cukup memadai, namun masih terdapat infrastruktur yang masih diperlukan. Untuk dimensi transparansi pemerintahan, pemerintah kabupaten Polewali Mandar telah maksimal dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan kini Polewali Mandar menuju kabupaten dengan predikat informatif. Selanjutnya dalam perspektif dan strategi politik, belum ada regulasi tentang kebijakan atau *masterplan Smart city* di Kabupaten Polewali Mandar yang dimana merupakan peraturan induk pelaksanaan *Smart governance*, sehingga membuat penerapan *smart governance* di Kabupaten Polewali Mandar belum maksimal.

5. Daftar Pustaka

- Aisyah, S. (2021). Implementasi Program Cerdas Command Center pada Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) Kota Manado pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. *Jurnal Administro (Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara)*, 3(2).
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/download/2794/1184>
- Anjani, S. J., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). Implementasi Program Surabaya Integrated Command Center (Sicc) Sebagai Upaya Peningkatan Smart Citydi Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(03).

<https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1536/1036>

Damayanthi, C. D., & Nugroho, A. A. (2023). Analisis Penerapan *Smart governance* Dalam Mewujudkan Smart City Di Kota Semarang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 7.0.

<https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/viewFile/884/pdf>

Gafar, I. H. H., & Nurrahman, A. (2024). Analisis Penerapan *Smart governance* di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4306>

Giffinger, R., C., F., H., K., Meijers, E., & Pichler-Milanovic, N. (2007). *Smart cities: Ranking of European medium-sized cities*.

Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pendekatan Kualitatif. Dalam I. S. Wekke (Ed.), *Metode Penelitian Sosial*. Gawe Buku.

Mauludi, M. R., & Nurrahman, A. (2024). Analisis *Smart governance* di Kota Bengkulu. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4693>

Nursetiawan, I., & Putra, R. A. K. (2021). Urgensi Penerapan *Smart governance* Dalam Prespektif Pelayanan Publik Di Desa Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.5098>

Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* (Vol. 44, Issue 2). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>

Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep *Smart governance* dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *International Journal Odf Damos*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87>

- Salamate, A. (2022). *Pelaksanaan Program Ternate Smart Island Command Center (Tsi Cc) Sebagai Wujud E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kota Ternate* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/10956/>
- Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). Smart City Di Kota Bandung: Suatu Tinjauan Aspek Teknologi, Manusia, Dan Kelembagaan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 16–40. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2315>
- Sarofah, R. (2022). Transformasi Pemerintah Lokal: Penerapan *Smart governance* melalui Konsep Kolaboratif di Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1). <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/751>
- Theresia, A. (2022). *Evaluasi Program Smart City Dalam Aspek Pelayanan Bandung Command Center Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/9879/>
- Timur, K., & Supriya, B. (2026). *Advancing Smart governance in Kazakhstan: A Critical Analysis of Digital Initiatives and Policy Implications*. In *Communications in Computer and Information Science*. 10.1007/978-3-032-07370-9_15
- Todapa, R., & Saputra, R. (2025). *Implementasi Smart governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Triyanto, D., Kismartini, Purnaweni, H., & Luqman, Y. (2024). Analisis Penerapan *Smart governance* di Kota Semarang. *Perspektif*, 13(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10817>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).